



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPANDI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 65322

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah Seluas 497 m2 di KULON PROGO, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 81.393.700

1. MOTOR, SUZUKI CRYSTAL SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 770.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000
3. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 23.700
4. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU PICK UP Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 24.800.000
6. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 890.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.705.267

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 389.988.967

III. HUTANG Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 309.988.967



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.